

# IMPLEMENTASI SIPELDUK (SISTEM PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN) DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TANJUNGSANG KABUPATEN SUBANG

Putri Melani

Universitas Sebelas April

## Article Info

### Article history:

Received Mei 10, 2025

Revised Mei 31, 2025

Accepted Juni 18, 2025

### Keywords:

Policy Implementation

Population Data Reporting System

Technology

## ABSTRACT

Current technological developments are very important for the implementation of government, in accordance with Subang Regent Regulation Number 75 of 2010 concerning the Main Duties, Functions and Work Procedures of Sub-districts in Subang Regency in realizing this policy, the Tanjungsang Sub-district government created SIPELDUK (Population Data Reporting System), a digital village innovation that supports e-government by providing valid, accurate, and integrated population data between villages and sub-district levels in the Tanjungsang area. Therefore, the purpose of this study is to determine how the implementation, obstacles, and efforts made in the management of SIPELDUK (Population Data Reporting System). The method used in this study is a qualitative research method with the objects of this study being 2 informants in Tanjungsang District, 1 informant in Sindanglaya Village, and 1 informant in Sirap Village. The data collection techniques used are literature study, field study and triangulation. Furthermore, for data validity techniques with credibility test, transferability test, dependability test, and confirmability test. While for data processing, namely with data collection, reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study found that the implementation of SIPELDUK (Population Data Reporting System) in Tanjungsang District has not been fully implemented properly, although in terms of policy dimensions and objectives as well as the attitudes or tendencies (dispositions) of the implementers, these are appropriate, but there are still obstacles in terms of resources, characteristics of implementing agents, communication between implementing activity organizations, and the economic, social, and political environment. Although in its implementation there are still obstacles in the content of the policy, information in management, and support from implementers, there is an effort to overcome these obstacles. It is expected to improve the implementation of SIPELDUK (Population Data Reporting System), it is necessary to optimize technological infrastructure, increase human resource capacity, conduct periodic evaluation and monitoring, increase public awareness and conduct ongoing research on the evaluation of SIPELDUK (Population Data Reporting System) in order to find out or study the extent to which its implementation has been carried out.



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

## Corresponding Author:

Putri Melani

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Email: [putrimelani9046@gmail.com](mailto:putrimelani9046@gmail.com)

## 1. INTRODUCTION

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan, Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Maksud adanya kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: “Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan”. Kabupaten Subang terdiri dari 30 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 245 Desa. Kecamatan Tanjungsang merupakan salah satu kecamatan dari 30 kecamatan yang ada di Kabupaten Subang merupakan salah satu kecamatan dari 30 kecamatan yang ada di Kabupaten Subang. Berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Subang, kecamatan mempunyai tugas pokok mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan atau kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan;
- e. Pengkoordinasian kegiatan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- f. Pengkoordinasian penerapandan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- l. Penyelenggaraan teknis ketatausahaan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Tanjungsang merupakan salah satu kecamatan dari 30 kecamatan yang ada di Kabupaten Subang. Kecamatan Tanjungsang memiliki 10 (sepuluh) desa dengan luas wilayah  $\pm 5.953,765$  Ha, dengan jumlah penduduk laki-laki 17.997 dan jumlah penduduk perempuan 17.830 dengan total jumlah penduduk yaitu 35.827.

Adapun kondisi umum Kecamatan Tanjungsang memiliki batas wilayah yang berbatasan sebelah utara Kecamatan Cijambe, sebelah selatan Kabupaten Bandung Barat, sebelah barat Kecamatan Cislak, dan sebelah timur dengan Kabupaten Sumedang. Kondisi topografis Kecamatan Tanjungsang, Suhu  $28^{\circ}\text{C}$  -  $34^{\circ}\text{C}$  dengan curah hujan 105 mm/tahun. Kecamatan Tanjungsang terletak pada ketinggian 700 m dari permukaan air laut dan jarak ke ibu kota kabupaten 30 dengan luas wilayah Kecamatan Tanjungsang 5.953,765 Ha. Adapun luas wilayah perdesa, sebagai berikut:

- |                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| a. Desa Tanjungsang dengan luas wilayah   | : 544,650 Ha   |
| b. Desa Buniara dengan luas wilayah       | : 1.713,556 Ha |
| c. Desa Cimeuhmal dengan luas wilayah     | : 372,820 Ha   |
| d. Desa Sirap dengan luas wilayah         | : 247,019 Ha   |
| e. Desa Kawungluwuk dengan luas wilayah   | : 441,923 Ha   |
| f. Desa Cibuluh dengan luas wilayah       | : 563,798 Ha   |
| g. Desa Sindanglaya dengan luas wilayah   | : 558,850 Ha   |
| h. Desa Rancamanggung dengan luas wilayah | : 551,605 Ha   |
| i. Desa Cikawung dengan luas wilayah      | : 305,352 Ha   |
| j. Desa Gandasoli dengan luas wilayah     | : 654, 192 Ha  |

Adapun peta kecamatan Tanjungsang Kabupaten Subang dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Peta Kecamatan Tanjungsiang

Sumber: LHAP Kecamatan Tanjungsiang. 2024

Melihat secara geografis kecamatan ini, masyarakat mengharapkan adanya pelayanan prima, khususnya dalam administrasi kependudukan yang merupakan salah satu elemen penting dalam tata kelola pemerintahan. Administrasi kependudukan mencakup berbagai layanan seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya. Dalam banyak kasus, proses pelayanan ini sering kali dihadapkan pada tantangan-tantangan seperti birokrasi yang rumit, waktu pelayanan yang lambat yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang, terdiri dari 10 desa dengan jumlah penduduk total sebanyak 38.401 jiwa, terdiri dari 19.435 laki-laki dan 18.966 perempuan. Program e-KTP yang dilaksanakan di kecamatan ini memiliki jumlah wajib e-KTP sebanyak 34.988 jiwa, terdiri dari 17.544 laki-laki dan 17.444 perempuan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah memiliki e-KTP, dengan 17.237 laki-laki dan 17.241 perempuan yang sudah terdaftar. Namun, terdapat 2.198 laki-laki dan 1.725 perempuan yang belum memiliki e-KTP.

SIPELDUK (Sistem Pelaporan Kependudukan) adalah adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan perubahan data kependudukan secara *real-time*. SIPELDUK bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pelayanan publik dalam administrasi kependudukan, seperti pencatatan kelahiran, kematian, perpindahan, dan kedatangan penduduk serta pendataan e-KTP. Penerapan SIPELDUK di kecamatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan data kependudukan yang lebih akurat dan cepat. Dengan adanya SIPELDUK, diharapkan proses pendataan e-KTP dapat berjalan lebih lancar, serta mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan administratif terkait kependudukan.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa

| Desa          | Jumlah Penduduk |
|---------------|-----------------|
| Tanjungsiang  | 5. 277          |
| Buniara       | 4.306           |
| Cimeuhmal     | 2.868           |
| Sirap         | 2.462           |
| Kawungluwuk   | 4.076           |
| Cibuluh       | 4.341           |
| Sindanglaya   | 4.121           |
| Rancamanggung | 3.077           |
| Cikawung      | 4.144           |
| Gandasoli     | 3.729           |
| <b>Total</b>  | <b>38.401</b>   |

Sumber: laman website SIPELDUK 2024

Tabel di atas memberikan gambaran tentang jumlah penduduk. Data ini diharapkan dapat digunakan untuk evaluasi lebih lanjut mengenai implementasi SIPELDUK dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

**Tabel 2. Kepemilikan e-KTP**

| Kategori             | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan |
|----------------------|--------|-----------|-----------|
| Wajib e-KTP          | 34.988 | 17.544    | 17.444    |
| Sudah memiliki e-KTP | 34.478 | 17.237    | 17.241    |
| Belum memiliki e-KTP | 3.923  | 2.198     | 1.725     |

Sumber: laman website SIPELDUK 2024

Kondisi ini menekankan pentingnya implementasi SIPELDUK (Sistem Pelaporan Data Kependudukan) untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Dengan sistem digital yang terintegrasi, diharapkan permasalahan ketidakakuratan data, lambatnya proses manual, dan kurangnya kompetensi perangkat desa dapat diatasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIPELDUK di Kecamatan Tanjungsang dan dampaknya terhadap efisiensi pelayanan publik.

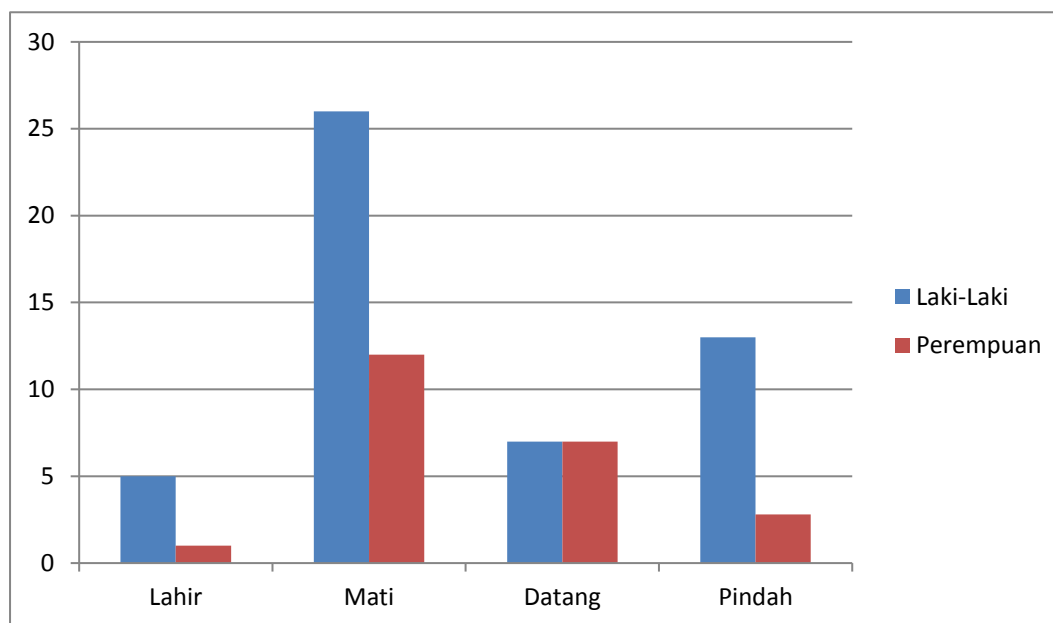
Program SIPELDUK (Sistem Pelaporan Kependudukan) memiliki beberapa produk layanan yakni berupa peristiwa kependudukan Kecamatan Tanjungsang seperti penduduk yang lahir, mati, datang dan pindah. Setiap hari, peristiwa kependudukan yang terjadi akan langsung tercatat dalam sistem. Berikut adalah definisi rinci dari masing-masing peristiwa kependudukan yang dicatat dalam SIPELDUK.

1. Kelahiran adalah peristiwa bertambahnya jumlah penduduk akibat lahirnya individu baru di suatu wilayah. Dalam konteks Sipelduk, setiap kelahiran harus segera dilaporkan agar dapat dicatat dalam dokumen resmi kependudukan, seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Data ini sangat penting untuk perencanaan program kesehatan ibu dan anak serta kebijakan pendidikan.
2. Kematian adalah peristiwa berkurangnya jumlah penduduk akibat wafatnya seseorang. Pencatatan kematian dalam Sipelduk bertujuan untuk memperbarui data kependudukan dan menghindari penggunaan data pribadi yang sudah tidak aktif. Selain itu, data kematian juga penting bagi pemerintah dalam perencanaan layanan kesehatan dan program bantuan sosial.
3. Kedatangan adalah peristiwa kependudukan di mana seseorang atau sekelompok orang berpindah dari luar wilayah dan menetap di wilayah yang baru. Dalam Sipelduk, pencatatan kedatangan bertujuan untuk mengetahui arus migrasi masuk, yang berpengaruh pada perencanaan pembangunan, layanan sosial, dan administrasi kependudukan.
4. Perpindahan adalah peristiwa kependudukan di mana seseorang atau keluarga meninggalkan suatu wilayah untuk menetap di tempat lain. Data perpindahan dalam Sipelduk membantu pemerintah dalam mengelola kepadatan penduduk, distribusi fasilitas umum, serta pengawasan mobilitas penduduk antar wilayah.

Dengan sistem ini, pemerintah dapat memperoleh data yang lebih akurat dan cepat untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan pelayanan publik dan memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap hak-haknya dalam administrasi kependudukan.

Adapun implementasi SIPELDUK (Sistem Pelaporan Data Kependudukan) dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik di kecamatan Tanjungsang, Kabupaten Subang dapat melihat melalui data capaian yang telah dicatat sepanjang tahun 2024. Grafik di bawah ini menunjukkan beberapa indikator kependudukan, seperti kelahiran, kematian, kedatangan, dan perpindahan penduduk berdasarkan jenis kelamin. Data ini mencerminkan efektivitas sistem data dalam mencatat serta mengelola informasi kependudukan guna mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan informasi dari laman website SIPELDUK Kecamatan Tanjungsang peristiwa kependudukan yang lahir, mati, datang dan pindah ini dikelola oleh operator masing-masing tiap desa yang ada di Kecamatan Tanjungsang dan bisa diakses oleh semua penduduk.



**Gambar 2. Data Capaian SIPELDUK Tahun 2024**

*Sumber : Data Capaian SIPELDUK Tahun 2024*

Berdasarkan data di atas dapat dilihat capaian kinerja SIPELDUK selama satu tahun terakhir terlihat bahwa jumlah kelahiran yang lebih rendah dibandingkan kematian serta tingkat perpindahan yang lebih tinggi dibandingkan kedatangan, wilayah ini berisiko mengalami penurunan jumlah penduduk secara alami. Hal ini dapat berdampak pada berbagai aspek pelayanan publik, seperti kebutuhan tenaga kerja, perencanaan infrastruktur, serta penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan.

Implementasi Sistem Pelaporan Data Kependudukan (Sipelduk) di Kecamatan Tanjungsiang memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika kependudukan di wilayah tersebut. Implementasi SIPELDUK menjadi sangat penting dalam mendukung pengelolaan data kependudukan secara *real-time*. Dengan sistem ini, pemerintah dapat mengidentifikasi tren kependudukan secara lebih cepat dan merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Data yang diperbarui setiap hari memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan bahwa setiap penduduk mendapatkan layanan administrasi kependudukan yang lebih baik.

Melalui analisis ini, dapat disimpulkan bahwa SIPELDUK berperan penting dalam membantu pemerintah memahami perubahan kependudukan, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta merancang kebijakan berbasis data yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kegiatan sistem pelaporan data kependudukan berbasis digital di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang berdampak terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas sehari-hari Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, hal tersebut sangat erat kaitannya dengan program Reformasi Birokrasi Tematik yang telah di programkan oleh pemerintah, khususnya pada program ke 3, yaitu digitalisasi administrasi pelayanan publik.

Seiring perkembangan teknologi, digitalisasi muncul sebagai solusi potensial untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik. Digitalisasi administrasi kependudukan dapat mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses administrasi, meningkatkan akurasi data, dan meminimalkan kesalahan manusia. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat menyediakan layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang berkualitas.

Namun, penerapan digitalisasi dalam administrasi kependudukan juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kesiapan infrastruktur teknologi, kemampuan sumber daya manusia, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui digitalisasi administrasi kependudukan, agar tujuan dari digitalisasi tersebut dapat tercapai dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Data kependudukan adalah informasi yang krusial untuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal maupun nasional. Data ini mencakup jumlah penduduk, distribusi usia, jenis kelamin, status

perkawinan, pekerjaan dan lainnya. Sistem pelaporan data kependudukan yang efektif di kecamatan sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dilaporkan akurat, terkini dan dapat digunakan untuk analisis yang mendalam.

Implementasi sistem pelaporan data kependudukan di Kecamatan Tanjungsiang menghadapi tantangan besar. Meskipun aplikasi pelaporan kependudukan sudah diterapkan, sistem pelaporan masih mengandalkan metode manual yang mengakibatkan ketidakakuratan data. Data jumlah penduduk yang dilaporkan sering tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya yang ditemukan di lapangan. Selain itu, proses pelayanan publik seperti penerbitan KTP dan surat keterangan miskin masih bergantung pada dokumen fisik dan tanda tangan kepala desa, yang memperlambat proses dan menambah kompleksitas. Kendala ini memerlukan perhatian khusus untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi sistem pelaporan dan pelayanan publik di desa-desa.

Implementasi sistem pelaporan data kependudukan di kecamatan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data dan pelayanan publik. Mengatasi masalah-masalah yang ada dan merancang strategi yang efektif akan sangat berpengaruh pada keberhasilan sistem ini.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan beberapa indikasi yang mengarah pada belum optimalnya implementasi sistem pelaporan data kependudukan di Kecamatan Tanjungsiang. Hal ini bisa dilihat dari indikasi-indikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat kelemahan dalam sistem komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Hal ini dapat dibuktikan dengan penggunaan sistem pelaporan manual yang tidak akurat, sehingga data kependudukan yang seharusnya mencapai 45.333 jiwa hanya tercatat 35.827, kesenjangan data ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar pihak terkait, serta berdampak pada hambatan dalam penyusunan kebijakan yang berbasis data valid.\
2. Minimnya sumber daya dan teknologi menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan. Sarana digitalisasi yang minim dapat memperlambat pelayanan publik, seperti pembuatan KTP dan Surat Keterangan Miskin yang memerlukan tanda tangan fisik kepala desa.. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanjungsiang.\
3. Lemahnya karakteristik agen pelaksana dalam implementasi kebijakan. Kurangnya kapasitas perangkat desa menunjukkan ketidakseimbangan antara cakupan luas wilayah kerja dengan jumlah dan kompetensi agen pelaksana. Sebagian kepala desa dan perangkatnya belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola tugas administratif yang kompleks di wilayahnya. Kemudian struktur birokrasi yang ada tidak mampu mendorong efisiensi atau memastikan alur informasi yang efektif untuk mendukung implementasi kebijakan administrasi kependudukan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanjungsiang.

Berdasarkan indikasi-indikasi di atas, maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI SIPELDUK (SISTEM PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN) DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TANJUNGSANG KABUPATEN SUBANG”**.

## 2. METHOD

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2012: 54) *Purposive sampling* adalah “Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti”. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah para pelaksana yang dianggap memiliki otoritas, informasi, serta paling tahu apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi situasi yang sedang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah Sekretaris Kecamatan Tanjungsiang, Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanjungsiang, Kasi Pemerintahan Desa Sindanglaya, dan Kasi Pemerintahan Desa Sirap yang dituangkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. Subjek Penelitian**

| No | Unsur                                   | Jumlah (orang) |
|----|-----------------------------------------|----------------|
| 1. | Sekretaris Kecamatan Tanjungsang        | 1              |
| 2. | Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanjungsang | 1              |
| 3. | Kasi Pemerintahan Desa Sindanglaya      | 1              |
| 4. | Kasi Pemerintahan Desa Sirap            | 1              |
|    | <b>Jumlah</b>                           | <b>4</b>       |

Untuk pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan teknik pengumpulan data penelitian adalah untuk mendapatkan data. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017: 224-241) sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menganalisis beragam literatur baik itu buku-buku ilmiah, dokumen, dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi lapangan, yaitu teknik yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian, diantaranya melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam melakukan uji keabsahan pada tiap tahap sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas
2. Uji Transferabilitas
3. Uji Depenabilitas
4. Uji Konfirmabilitas

### 3. RESULTS AND DISCUSSION

Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah direncanakan dengan teliti. Implementasi ini lebih dari sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan teliti dengan memperhatikan standar tertentu untuk mencapai tujuan. Akibatnya, pelaksanaan tidak berjalan secara mandiri, tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Dalam implementasi kebijakan ini terdapat 4 dimensi seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Horn dalam (Agustino, 2020: 150-153) yakni:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan keseluruhan dari Implementasi SIPELDUK (Sistem Pelaporan Data Kependudukan) Dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik di Kecamatan Tanjungsang Kabupaten Subang, sebagai berikut:

**Tabel 4. Kesimpulan dalam Implementasi SIPELDUK (Sistem Pelaporan Data Kependudukan) Dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik di Kecamatan Tanjungsang Kabupaten Subang**

| No | Dimensi                     | Indikator                      | Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ukuran dan Tujuan Kebijakan | a. Ukuran Keberhasilan Program | Pelaporan peristiwa kependudukan meliputi kelahiran, kematian, pindah, dan datangnya penduduk telah dilakukan secara digital. Aplikasi SIPELDUK berperan sebagai sistem yang memfasilitasi penginputan dan penyampaian data kependudukan secara efisien di tingkat desa hingga kecamatan. Digitalisasi ini mendukung efektivitas pelaporan dan pencatatan data kependudukan. |
|    |                             | b. Tujuan Program              | SIPELDUK merupakan inovasi digital desa yang mendukung <i>e-government</i> dengan menyediakan data kependudukan yang valid, akurat, dan terintegrasi antara desa dan tingkat kecamatan di wilayah Tanjungsang.                                                                                                                                                               |

|    |                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Sumber Daya                                                    | a. Sumber Daya Manusia                                            | Meskipun implementasi SIPELDUK telah dimulai, masih ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini mencakup baik operator yang mengelola aplikasi maupun masyarakat yang terlibat. Keterampilan dalam penggunaan teknologi dan pemahaman terhadap aplikasi digital sangat penting untuk memastikan efektivitas SIPELDUK.                                                                                                     |
|    |                                                                | b. Sarana dan Prasarana                                           | Secara keseluruhan, ada komitmen dari pihak kecamatan dan desa untuk meningkatkan administrasi kependudukan, tetapi keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada alokasi anggaran yang tepat, pengembangan sistem yang sesuai, dan dukungan dari semua pihak terkait.                                                                                                                                                                                  |
| 3. | Karakteristik Agen Pelaksana                                   | a. Keseimbangan Cakupan Luas Wilayah dengan Jumlah Agen Pelaksana | Implementasi SIPELDUK di Kecamatan Tanjungsiang belum menunjukkan keseimbangan antara cakupan wilayah dan jumlah agen pelaksana. Setiap desa hanya memiliki satu operator yang merangkap banyak tugas, tanpa mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, maupun kebutuhan pelayanan. Hal ini menghambat efektivitas dan pemerataan pelayanan administrasi kependudukan, terutama karena sistem belum menjangkau hingga tingkat dusun.                      |
|    |                                                                | b. Struktur Birokrasi                                             | Struktur birokrasi dalam implementasi SIPELDUK di Kecamatan Tanjungsiang dinilai sudah terorganisasi dengan baik. Pembagian peran, tugas, dan wewenang telah ditetapkan secara jelas pada tiap level pemerintahan. Hal ini mendukung kelancaran koordinasi, mempercepat proses pelayanan, dan memastikan mekanisme pelaporan berjalan secara berjenjang. Dengan demikian, struktur birokrasi sudah cukup baik dan mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan. |
| 4. | Sikap atau Kecenderungan ( <i>Disposition</i> ) Para Pelaksana | a. Respon Para Pelaksana                                          | Berdasarkan pernyataan para pelaksana dari tingkat kecamatan hingga desa, dapat disimpulkan bahwa secara umum mereka menunjukkan sikap yang positif dan mendukung terhadap implementasi kebijakan, khususnya dalam konteks digitalisasi pelayanan publik. Para pelaksana sepakat bahwa kebijakan tersebut membawa manfaat dalam mempermudah pekerjaan dan meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.                                                  |
|    |                                                                | b. Pemahaman Implementor terhadap Kebijakan                       | Sebagian besar implementor di tingkat kecamatan dan desa telah memahami kebijakan serta teknis penggunaan aplikasi SIPELDUK, khususnya dalam penginputan dan akses data kependudukan. Namun, masih terdapat kendala pada aspek pemahaman secara menyeluruh di tingkat desa karena kurangnya sosialisasi yang merata.                                                                                                                                           |
| 5. | Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana            | a. Koordinasi                                                     | Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan aplikasi SIPELDUK telah berjalan di tingkat kecamatan, bahkan sudah dilakukan uji coba pelaporan. Namun, tingkat koordinasi pelaksanaan di desa masih bervariasi. Ada desa yang masih sebatas antar kasi pemerintahan (internal), dan ada yang sudah menjangkau struktur bawah seperti RW dan RT.                                                                                                                        |
|    |                                                                | b. Praktek                                                        | Secara umum, pelaporan peristiwa kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|    |                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                        | Pelaksanaan Kebijakan       | secara digital melalui SIPELDUK sudah mulai berjalan di tingkat desa, dan sebagian desa telah berhasil memanfaatkan fitur-fitur sistem dengan baik. Namun, implementasinya belum merata karena masih ada desa yang mengalami kendala teknis, terutama terkait kualitas SDM dan akses internet, sehingga belum semua desa dapat melaporkan peristiwa secara optimal.                                                                                                                                    |
| 6. | Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik | a. Pengaruh Kondisi Ekonomi | Pengurangan biaya pengadaan alat tulis kantor (ATK), pengurangan ongkos perjalanan dalam penyampaian laporan ke tingkat kecamatan, berkurangnya kebutuhan pencetakan dokumen secara manual karena laporan kini dapat dilakukan secara klik otomatis melalui sistem. Kondisi ekonomi desa dan pemanfaatan teknologi berperan penting dalam mendukung efisiensi ini.                                                                                                                                     |
|    |                                        | b. Pengaruh Kondisi Sosial  | Masyarakat Kecamatan Tanjungsiang telah memiliki akses terhadap data umum kependudukan melalui laman tanjungsiang.com yang memuat sistem SIPELDUK. Namun, akses ini masih terbatas pada fitur melihat data umum dan belum disertai dengan pemahaman menyeluruh dari masyarakat akibat keterbatasan sosialisasi atau literasi digital.                                                                                                                                                                  |
|    |                                        | c. Pengaruh Kondisi Politik | Penerapan peta kependudukan digital di Kecamatan Tanjungsiang telah dimulai dan dianggap memberikan gambaran yang bermanfaat, terutama dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, implementasinya belum merata di seluruh desa. Kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan akses internet, terutama di wilayah desa. Sementara beberapa desa menilai sistem ini sudah berjalan baik, namun secara umum pelaksanaannya masih menghadapi hambatan teknis dan kapasitas. |

Sumber: Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dalam Implementasi SIPELDUK (Sistem Pelaporan Data Kependudukan) dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, secara keseluruhan cukup baik dikarenakan masih adanya kekurangan di beberapa indikator.

Faktor ukuran dan tujuan kebijakan dalam Implementasi SIPELDUK (Sistem Pelaporan Data Kependudukan) dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik di Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang dikatakan sudah baik karena telah memenuhi aspek yang diperlukan dalam implementasi SIPELDUK (sistem pelaporan data kependudukan) seperti dalam ukuran dan keberhasilan program, terdapat aplikasi SIPELDUK sebagai sistem yang memfasilitasi penginputan dan penyampaian data kependudukan secara efisien di tingkat desa. Sehingga desa memiliki data kependudukan yang valid dan dapat terkoneksi ke kecamatan. Pelaporan peristiwa kependudukan ini meliputi kelahiran, kematian, pindah, dan datangnya penduduk telah dilakukan secara digital. Hal ini sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2002: 121) mengemukakan bahwa “Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan”.

Selanjutnya faktor sumber daya sudah berada pada kategori cukup baik. Ketersediaan SDM dinilai sudah mencukupi untuk menjalankan operasional sistem, namun masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas, terutama dalam hal keterampilan operator dan literasi masyarakat pengguna. Di sisi lain, sarana dan prasarana yang tersedia juga mendukung, namun pengembangan sistem dan sinergi lintas sektor masih harus diperkuat untuk mendukung keberlanjutan dan optimalisasi sistem. Hal ini sejalan dengan pendapat Sedarmayanti (2009: 245) yang mengemukakan bahwa “Efektivitas implementasi suatu kebijakan

publik sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas”. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kedua aspek tersebut menjadi kunci dalam mendorong efisiensi pelayanan publik melalui SIPELDUK.

Dalam aspek karakteristik agen pelaksana dapat dikatakan cukup baik, terdapat aspek yang belum memenuhi dalam pelaksanaannya. Meskipun struktur birokrasi sudah tertata dengan jelas, ditandai dengan pembagian peran, tugas, dan wewenang yang terdefinisi pada setiap level pemerintahan, namun masih terdapat ketimpangan dalam distribusi sumber daya manusia, khususnya pada indikator keseimbangan cakupan wilayah dan jumlah agen pelaksana. Setiap desa hanya memiliki satu operator yang merangkap berbagai tugas, tanpa mempertimbangkan faktor kebutuhan pelayanan, luas wilayah, dan jumlah penduduk, serta belum menjangkau pelayanan hingga tingkat dusun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara struktural birokrasi sudah terbentuk dengan baik, pelaksanaannya belum sepenuhnya mendukung efisiensi pelayanan publik. Menurut Siagian (2008:130), “Struktur organisasi yang baik harus memperhatikan pembagian tugas yang proporsional dan penyebaran sumber daya yang adil untuk menjamin efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi publik”. Oleh karena itu, dimensi struktur organisasi SIPELDUK masih perlu pembenahan dalam hal distribusi agen pelaksana agar lebih seimbang dan merata.

Selanjutnya faktor sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana sudah baik. Hal ini terlihat dari dukungan dan penerimaan positif dari para pelaksana terhadap kebijakan yang diterapkan, serta pemahaman mereka yang memadai mengenai fungsi dan tujuan utama sistem, khususnya dalam hal input dan pelaporan data kependudukan. Tingkat kesiapan dan keterlibatan pelaksana menunjukkan bahwa kebijakan telah diterima dan dijalankan dengan semangat yang mendukung tujuan pelayanan publik yang lebih efisien. Penilaian ini sejalan dengan pendapat Edwards III (1980:10) yang menyatakan bahwa “Disposisi atau sikap pelaksana terhadap kebijakan merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi, karena sikap positif akan mendorong komitmen dalam pelaksanaan kebijakan secara efektif”.

Kemudian faktor selanjutnya komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana tergolong cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya upaya awal dalam membangun koordinasi dan penerapan sistem pelaporan digital, meskipun belum sepenuhnya merata dan menyeluruh di seluruh desa. Masih terdapat kendala pada keterlibatan semua elemen penting di tingkat desa serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar pihak, peningkatan kapasitas aparatur desa, standarisasi mekanisme pelaporan, serta evaluasi berkelanjutan untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan sistem. Menurut Van Meter dan Horn (Agustino, 2020: 153) mengemukakan bahwa “Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terbaik dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya”.

Aspek selanjutnya yaitu lingkungan ekonomi, sosial dan politik dapat dikatakan cukup baik. Dari sisi ekonomi, penerapan SIPELDUK telah menunjukkan korelasi positif dengan efisiensi anggaran melalui digitalisasi layanan, yang menandakan bahwa sistem ini sudah dimanfaatkan secara efektif untuk mengurangi beban biaya operasional. Namun, dari sisi sosial, pemanfaatan sistem oleh masyarakat masih rendah karena kurangnya sosialisasi, rendahnya literasi digital, dan fitur interaktif yang terbatas, sehingga pemanfaatan sistem belum optimal. Sementara itu, dari aspek politik, dukungan terhadap implementasi sistem sudah ada, namun masih terdapat tantangan seperti belum meratanya peta kependudukan dan hambatan teknis di tingkat desa. Oleh karena itu, ketiga indikator menunjukkan bahwa meskipun implementasi SIPELDUK telah berjalan, namun secara keseluruhan masih berada pada kategori cukup baik dan perlu peningkatan pada aspek sosial dan teknis. Hal ini sejalan dengan pendapat Dunn (2003:405) yang menyatakan bahwa “Efektivitas implementasi kebijakan publik tidak hanya bergantung pada struktur formal dan peraturan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal yang mendukung atau menghambat pelaksanaan program”.

#### 4. CONCLUSION

Implementasi SIPELDUK (Sistem Pelaporan Data Kependudukan) dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik di Kecamatan Tanjungsang Kabupaten Subang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Meskipun dalam ukuran dan tujuan kebijakan serta sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana ini sesuai namun masih terdapat kendala dalam segi sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Faktor-faktor penghambat Implementasi SIPELDUK (Sistem Pelaporan Data Kependudukan) dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik di Kecamatan Tanjungsang Kabupaten Subang ini yaitu rendahnya pemahaman para pelaksana terhadap isi kebijakan SIPELDUK, kualitas koneksi internet menjadi kendala dalam mengoptimalkan implementasi sistem ini, informasi mengenai SIPELDUK belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, dan kualitas jaringan yang tidak stabil.

Upaya mengatasi hambatan Implementasi SIPELDUK (Sistem Pelaporan Data Kependudukan) dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik di Kecamatan Tanjungsang Kabupaten Subang ini yaitu evaluasi

pembaruan sistem secara berkala, alokasi anggaran untuk pelatihan dan penyediaan sarana penunjang, peningkatan dan pemeliharaan jaringan serta pemanfaatan teknologi informasi yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, perencanaan sosialisasi yang menyasar masyarakat luas melalui kerjasama antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, serta pelatihan dan penyediaan fasilitas yang lebih baik.

## REFERENCES

- Abdurrohim, A. (2021). Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Universitas Sebelas April Sumedang.
- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2018. *Ekologi Administasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Budiman, J. F. (2021). PENGARUH SOSIALISASI SISTEM INFORMASI E-MP (ELEKTRONIK MANAJEMEN PENYIDIKAN) TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PENYIDIK PADA POLRES SUMEDANG. Repository FISIP UNSAP, 21(1).
- Burso, Muhammad. 2018. *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Alam*. Jakarta: Prenademia Group.
- Daniel Armando Julius, D., Sudrajat, Y., & M IP, Y. (2024). EFEKTIVITAS PENERAPAN ELECTRONIC OFFICE (E-OFFICE) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANGERANG (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose, Ed.). Widya Karya Semarang.
- Juahiriyah, Oktaf. (2017) "Jurnal Pembangunan Nagari Volume 2 Nomor 1", Penerapan Elektronik office Dalam Administrasi Perkantoran Studi Kasus: Balitbangda Prov. Sumsel, Juni.
- Kaligis, R. S. V., Sompie, B. F., Tjakra, J., & Walangitan, D. R. O. (2013). Pengaruh implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap produktivitas kerja. *Jurnal Sipil Statik*, 1(3).
- Megawaty, M. (2020, February). Aplikasi E-Office pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BPPD) Menggunakan Pendekatan Metode Extreme Programming. In *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)* (Vol. 1, No. 1, pp. 176-181).
- Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayan*. Bandung: Alfbeta
- Musanef. (2009). *Manajemen Kepegawain di Indonesia*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- NADARIA, S. (2020). Implementasi E-Office Pada Dinas TenagaKerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Nugraha, D. S. (2023). Implementasi PERDA Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sumedang. *JRPA-Journal of Regional Public Administration*, 8(1), 39–45.
- Robbins, S. P. (2006). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Prehalindo.
- Sedarmayanti. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sellang, K. (2019). *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Jawa Timur: Qiara Media Partner.
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sididi, M., & Rasmiaji, R. (2021). Pengaruh Implementasi Program K3 Terhadap Produktivitas Kerja pada Perawat Di RSUP. Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar tahun 2021. In *Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* (Vol. 4, pp. 536-544).
- Sitorus, G. K., Rares, J. J., & Plangiten, N. N. (2020). Pengaruh Implementasi Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kinilo Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik* 6.91.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Brilliant.
- Sobirin. (2023). *Implementasi Kebijakan (Studi Kasus, Teori dan Aplikasinya)*. Yogyakarta: Chakti Pustaka Indonesia.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunoyo, Danang. 2015. *Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service)
- Sutrisno, Edy. 2017. *Manajemen Sumber Daya Alam*. Jakarta: Kencana.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (Dede Mariana & Caroline Paskarina, Ed.). AIPI Bandung
- Taufik, M. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 135-140.

---

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Selemba Empat

Winarno, Budi. 2017. Globalisasi Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia. Jakarta: Erlangga